BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kedudukan Para Pihak dalam Surat Perintah Kerja dalam kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimaksud, hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan kontraktual antara dua badan usaha, yaitu PT XY selaku Pemberi Tugas dan CV. Pahala Kencana sebagai Penerima Tugas. Hubungan ini sah menurut hukum perdata Indonesia karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer (KUHPerdata) dan bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer (KUHPerdata). Dengan adanya hubungan hukum tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yakni antara PT XY dengan CV Pahala Kencana. Surat perintah kerja tersebut juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki para pihak yang terlibat.

Namun terdapat beberapa perlindungan hukum yang didapatkan CV. Pahala Kencana sebagai pihak pelaksana meliputi sanksi-sanksi keterlambatan untuk mendapatkan hak atas pembayaran sesuai nilai kontrak. Dengan demikian PT XY telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya, hal ini menimbulkan adanya kerugian bagi CV Pahala Kencana. Yang mana dengan demikian CV Pahala Kencana memiliki hak atas kepastian hukum dan melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia

untuk mengembalikan dan mendapatkan haknya kembali selaku pihak kedua dalam kontrak perjanjian kerja ini.

4.2 Saran

1. Dibutuhkannya penyusunan kerangka Surat Perintah Kerja dengan jelas dan komprehensif. Tidak hanya melingkupi jangka waktu pengerjaan, ruang lingkup pengerjaan, standar kualitas, nilai kontrak, dan tata cara pembayaran. Namun, juga menyantumkan mengenai sanksi atas pelanggaran ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (ketika terjadi wanprestasi), hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya multitafsir.
2. Disarankan agar pihak kedua selaku penerima kerja dalam hal ini CV. Pahala Kencana untuk lebih memperhatikan isi kontrak perjanjian sebelum melakukan penandatanganan persetujuan untuk melakukan kontrak perjanjian kerjasama. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian .